

# Dari Dewan Pengurus

**S**ejak diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, setiap kabupaten dan kota di Indonesia telah mempunyai kerangka kewenangan yang cukup luas dalam mengelola pemerintahan dan keuangan di daerahnya. Ini sesuai dengan asas desentralisasi yang menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota. Di pihak lain tampaknya masih kurang disadari atau dijalankan bahwa kedua undang-undang tersebut sesungguhnya dilahirkan dengan tujuan bahwa sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Setelah empat tahun berjalan, otonomi daerah ternyata masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Antara lain kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota, tingginya praktek-praktek KKN dalam pengelolaan keuangan daerah, masih kurang terbukanya penyusunan keuangan daerah serta kurang pastinya keterlibatan organisasi masyarakat sipil (civil society) dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan program dan keuangan maupun dalam pengawasan pemerintah daerah.

Namun demikian, dengan berbagai kelemahannya itu, bagaimana pun juga adanya Otonomi Daerah ini dapat memberikan kesempatan kepada komunitas masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan pembaharuan pemerintahan sehingga pemerintah daerah lebih akuntabel kepada publik.

Dengan dasar pemikiran seperti inilah, maka terhitung tanggal 1 Juli 2003 YAPPIKA mulai menjalankan Partnership Program for Development, Phase II, disingkat PPD II yang difokuskan kepada upaya untuk mengembangkan tata-pemerintahan di daerah yang demokratis (democratic local governance). Secara umum program yang



**Rustam Ibrahim**  
Ketua Dewan Pengurus



akan berlangsung selama 4 tahun tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam upaya mengurangi kemiskinan dan melakukan advokasi yang efektif untuk mempengaruhi kebijakan publik di daerah. Dalam jangka waktu empat tahun diharapkan program akan dapat memberikan pengaruh (outcomes) antara lain berupa: (1) meningkatnya kapasitas LSM/kelompok-kelompok masyarakat untuk mempengaruhi berbagai kebijakan publik di daerah; (2) meningkatnya dukungan dari masyarakat luas terhadap isu-isu yang dilontarkan kalangan LSM; dan (3) meningkatnya interaksi, komunikasi dan dialog kebijakan antara LSM dengan pemerintah di berbagai tingkat.

Sesuai dengan namanya PPD II merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari PPD I, salah satu program andalan YAPPIKA yang sudah berlangsung selama 6 tahun (Juli 1997 s.d 30 Juni 2003). PPD II akan berlangsung di 18 kabupaten terpilih di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua dan Maluku. Khusus untuk Propinsi NAD, mengingat situasi darurat militer yang sedang berlangsung, yang tampaknya tidak memungkinkan YAPPIKA dan LSM-LSM lokal untuk bekerja di sana sekarang ini, maka untuk sementara akan ditunda pelaksanaannya. Diharapkan pada waktunya YAPPIKA akan dapat ikut serta dalam program-program pemulihan ekonomi masyarakat maupun dalam membangun perdamaian (peace-building). Dan untuk melaksanakan PPD II, dengan bantuan CIDA, secara keseluruhan YAPPIKA akan menyediakan dana sebesar C \$ 5,000,000 atau sekitar Rp 25 milyar.

Sebagai Aliansi Masyarakat Sipil sukses program YAPPIKA ini akan banyak tergantung LSM, jaringan LSM, kelompok-kelompok masyarakat serta organisasi masyarakat sipil lainnya yang menjadi mitra YAPPIKA di daerah. Organisasi-organisasi inilah yang akan menjadi "ujung tombak" suksesnya program PPD II ini. YAPPIKA dalam banyak hal adalah fasilitator. Semoga!

# Dari Direktur Eksekutif

## Merajut Simpul-simpul Gerakan Masyarakat Sipil

**D**emokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat sipil yang kuat. Adagium itulah yang membingkai semangat kerja kami di Yappika sepanjang periode 2002-2003 ini. Dalam pandangan kami di Yappika, setidaknya ada empat agenda pokok yang perlu mendapat perhatian Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk secara efektif dapat mengawal masa transisi Indonesia menuju sistem demokrasi.

Pertama, terlibat aktif dalam proses-proses penyempurnaan berbagai produk kebijakan publik yang merupakan konsekuensi logis dari adanya perubahan UUD 1945. Perhatian pada masalah ini perlu dilakukan untuk mencegah lahirnya produk-produk kebijakan yang sangat kental diwarnai oleh kepentingan pemerintah dan pemilik modal, sambil sekaligus menegaskan atau bahkan merugikan kepentingan masyarakat sipil. OMS perlu mendorong lahirnya produk kebijakan yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya.

Kedua, mendorong terciptanya tata pemerintahan yang demokratis, yakni sebuah tata pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif dan responsif melayani kepentingan-kepentingan masyarakat luas. Kalangan OMS perlu memberikan perhatian pada model kelembagaan dan budaya kerja aparat birokrasi. Praktek-praktek birokrasi yang tertutup, dominatif dan korup harus didorong untuk berubah. OMS harus dengan serius menyoroti masalah-masalah pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan birokrasi termasuk parlemen-melalui upaya-upaya pemantauan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi, pelanggaran HAM serta pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Ketiga, mengembangkan wacana pluralisme untuk meminimalisir terjadinya konflik kekerasan antar masyarakat. Perhatian atas hal ini penting dilakukan mengingat realitas yang berlangsung belakangan ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah terjadi konflik horisontal. Situasi konflik yang terus menerus

## Membangun Kepercayaan

*Saya ikut terlibat mendirikan Yappika ketika masih dengan satu 'p' yaitu Persahabatan Indonesia Kanada (YAPIKA) saat mana saya masih menjabat sebagai Direktur Eksekutif Walhi. Awalnya Yappika didirikan untuk memberikan edukasi di Kanada tentang upaya pengembangan masyarakat (community development) maupun advokasi yang dilakukan oleh NGOs di Indonesia; apa kepeduliannya, apa tantangannya, bagaimana geraknya, dsb. Tujuannya supaya masyarakat Kanada lebih tahu banyak tentang apa yang terjadi di Indonesia karena selama itu hanya sedikit informasi yang mereka peroleh tentang Indonesia di Kanada. Ketika itu ada Steering Committees, di Kanada dan di Indonesia yang kebetulan saya pimpin pada waktu itu.*

*Yappika memang dibentuk untuk mendukung kerjasama CIDA dgn Indonesia, karena selama itu CIDA membantu negara yang sedang berkembang melalui NGOs mereka sendiri. Kami pada waktu itu berpikir sebaiknya bantuan CIDA melalui NGOs Indonesia, yang lebih mengenal dan mengetahui kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama mereka yang termarginalkan, serta berpendidikan rendah. Hal itulah yang mendasari lahirnya Yappika ketika itu.*

*Setelah 12 tahun saya tidak tahu apakah Yappika masih efektif menjadi jaringan NGOs di*



Indonesia yang menjalin hubungan secara teratur dengan jaringan NGOs di Kanada. Yang saya ketahui adalah Yappika tetap melakukan pemberdayaan bagi kelompok swadaya masyarakat di Indonesia sehingga CIDA tidak perlu lagi hanya menggunakan NGOs mereka di Indonesia. Saat ini Yappika tidak lagi dikenal hanya sebagai penyalur dana CIDA tetapi lebih sebagai NGO yang melakukan pemberdayaan terhadap LSM lain atau lebih dikenal sebagai Civil Society Resources Organization (CSRO).

Saya melihat kekuatan Yappika saat ini adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kalangan NGOs yang bergerak dalam bidang community development maupun yang bergerak dalam bidang advokasi. Kedua jenis LSM ini percaya kepada Yappika. Kepercayaan ini harus dimanfaatkan oleh Yappika untuk lebih transparan dan akuntabel kepada stakeholders nya, baik CIDA sebagai penyandang dana, maupun LSM dan kelompok masyarakat mitra kerjanya, serta publik luas. Di masa sekarang, ketika masyarakat termasuk LSM lebih sadar akan pentingnya Good Governance, maka CSROs seperti Yappika, WALHI, YLBHI, dll, tidak lagi cukup hanya transparan dan akuntabel kepada donor dan anggota atau mitranya saja. Mereka juga diharapkan untuk transparan dan akuntabel pada masyarakat luas. Saya senang dan bangga bahwa Yappika melakukan hal tersebut melalui laporan tahunan ini.

**Erna Witoelar**  
**Ketua Pengurus Yayasan KEHATI**

**Ketua Partnership for  
Governance Reform**

berlangsung dapat menghambat masyarakat sipil mengembangkan potensinya untuk berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik.

Keempat, melakukan pemberdayaan masyarakat utamanya masyarakat marginal-- untuk meningkatkan kemampuan mereka mendapatkan dan mengelola akses sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi dan sumberdaya politik. OMS perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai realitas sosial yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha melihat kemungkinan-kemungkinan untuk mengubahnya bagi peningkatan kualitas kehidupan mereka. Diperlukan juga upaya memfasilitasi masyarakat untuk mampu mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingannya, serta mengawasi proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Upaya-upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan mengorganisir masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang bersifat horisontal tidak birokratis dan hirarkis dengan keanggotaan yang bersifat terbuka berdasarkan pada kebutuhan/kepentingan yang sama dan setara.

Keempat agenda di atas, bisa dikatakan sebagai tantangan bagi OMS dalam memperkuat masyarakat sipil yang terorganisir (organized civil society) dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) secara simultan. Tantangan-tantangan itu bukanlah suatu hal yang ringan, lebih-lebih bila merujuk pada hasil-hasil lokakarya penilaian kesehatan masyarakat sipil yang dilakukan Yappika sepanjang tahun ini. Lokakarya-lokakarya yang berlangsung pada enam region dan diakhiri dalam sebuah lokakarya nasional itu diikuti oleh 302 orang penggiat dari beragam OMS. Hasil-hasil dari serangkaian lokakarya tersebut menyimpulkan bahwa masyarakat sipil di Indonesia berada dalam kondisi yang kurang sehat, baik ditinjau dari kondisi lingkup organisasi, nilai-nilai, hasil kerja dan relasi-relasi yang dibangun antar sesama OMS maupun dengan berbagai pihak lainnya. Dengan demikian, selain memiliki tantangan-tantangan yang harus disikapi, OMS pun harus memberikan perhatian yang signifikan untuk meningkatkan kinerjanya.



Berbagai tantangan-tantangan itulah yang menjadi perhatian kami di Yappika sepanjang tahun 2002-2003. Kami terus melakukan berbagai aktivitas untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sipil mengawal proses transisi demokrasi yang sedang berlangsung, sambil sekaligus ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik guna membuka ruang-ruang bagi ekspresi perhatian dan kepedulian masyarakat sipil.

Pada tingkat masyarakat, kami terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan mitra-mitra Yappika dalam melakukan penguatan organisasi rakyat, baik yang berbasis pada petani, nelayan maupun miskin kota. Dalam hal perubahan kebijakan tingkat nasional, Yappika terus terlibat dalam koalisi-koalisi Ornop yang melakukan advokasi UU Politik, UU Pemilu, UU Susduk, dan berbagai kebijakan nasional lainnya. Yappika juga terus menjalankan fungsinya sebagai sekretariat koalisi ornop untuk perubahan undang-undang yayasana dan usulan undang-undang partisipasi.

Pada tingkatan publik yang lebih luas, Yappika terus melakukan kampanye untuk mendorong tata pemerintahan yang demokratis, pluralisme, dan anti kekerasan. Pada tahun ini, Yappika bersama dengan beberapa Ornop lainnya di Jakarta melakukan festival pluralisme (RAKK-fest) yang dilangsungkan di Taman Ismail Marzuki. Beberapa publikasi yang dihasilkan Yappika --salah satunya buku foto: "Jalan Panjang Menuju Demokrasi"-- juga diluncurkan kepada publik sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan gagasan-gagasan demokrasi lebih meluas. Kampanye publik juga kami lakukan dengan menyelenggarakan forum-forum pertemuan dengan mengundang berbagai komponen masyarakat sipil lainnya, seperti media massa, perguruan tinggi dan kelompok-kelompok mahasiswa.

Apa yang kami lakukan sepanjang tahun 2002-2003 ini tentu saja belum mencukupi dibandingkan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat sipil. Kami menyadari untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, Yappika tidak mungkin melakukannya sendiri. Dibutuhkan suatu kerja sinergis antara Yappika dengan berbagai OMS lainnya, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat sektoral yang digeluti. Berkenaan dengan hal itu, kami tetap mengundang berbagai pihak untuk bergandengan tangan dan merajut simpul-simpul gerakan masyarakat sipil menjadi sebuah koalisi besar yang melibatkan beragam OMS dengan berbagai kemampuan di dalamnya. Marilah kita bersana-sama membangun suatu kehidupan bermasyarakat yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi berkembangnya demokrasi di Indonesia.

## Sosialisasi Ide Melalui Seni

*Saya lihat Yappika termasuk LSM yang percaya kepada salah satu fungsi kesenian, yaitu sebagai alat untuk sosialisasi ide-ide. Setidaknya 2 kali saya diajak turut serta dalam program mereka. Saya kira pekerja seni lainnya juga tidak sedikit yang mendapat kesempatan bekerjasama dengan Yappika dalam sosialisasi ide-ide perubahan.*

*Ke depan langkah demikian perlu terus dipertimbangkan oleh Yappika, termasuk program-program di kawasan Timur Indonesia, kawasan yang menyimpan banyak potensi kesenian.*



**Sujiwo Tejo**  
Budayawan

**Lili Hasanuddin**  
Direktur Eksekutif

Yappika sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat saya kenal sejak tahun 1995. Program Yappika memang menyentuh kebutuhan mendasar dari rakyat yang merindukan kebebasan program yang memperjuangkan kebenaran, keadilan, demokrasi, hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat yang merupakan komitmen Yappika.

Salah satu program Yappika yang cukup menarik dari pengembangan ekonomi adalah mengembangkan peternakan dan pertanian yang menjauhi makanan dan pupuk yang mengandung kimia, sebab memang aneka penyakit aneh dewasa ini bisa dikatakan sebagai akibat kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kimia.

Mengenai perjuangan moralitas dan supremasi hukum khususnya mengenai HAM pasti akan mengalami berbagai tantangan dan ancaman. Tetapi perjuangan yang berdasarkan komitmen moral yang akhirnya bermuara pada pemahaman, penghayatan dan perwujudan amanat iman pasti akan ada hasil, Insya Allah.

**Lukas Karl Degey**  
Anggota DPR-RI

## Pemberdayaan Rakyat

*"Datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka, belajarlah dari mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka tahu, bangunlah dari apa yang mereka punya. Pendamping yang baik adalah: ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan, rakyat berkata, "Kami sendirilah yang mengerjakannya"*  
Lao-Tse

Partnership Program for Development (PPD) hampir mencapai masa akhir program, oleh karenanya, tidak banyak lagi program lapangan yang didukung oleh YAPPIKA pada periode 02/03 ini (April 2002 s/d Maret 2003). Dukungan ke wilayah hanya diberikan kepada Yayasan Pengembangan Bambu Flores (YPBF), Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Bulukumba, dan beberapa lembaga lain yang masih melanjutkan revolving loan fund.

Sebagian besar energi YAPPIKA dicurahkan untuk peningkatan kapasitas mitra lapangan (ORNOP) melalui pelatihan dan pemberian kesempatan untuk magang; serta melakukan evaluasi dan audit keuangan di semua program lapangan. Selain itu, ada pula usaha untuk melakukan analisis dan mendokumentasikan sistem ekonomi alternatif, yang masih eksis, digunakan oleh komunitas tertentu di Pulau Lembata, NTT. Dokumentasi ini telah diterbitkan dan tersedia di kantor YAPPIKA. Dan ada juga beberapa dukungan kecil untuk mengupayakan dialog antara kelompok dampingan ORNOP mitra dengan Pemerintah Daerah.

YAPPIKA memperoleh banyak pelajaran berharga, dari keseluruhan perjalanan PPD sejak tahun 1997. Dan pembelajaran paling menarik dan paling mengesankan adalah yang diperoleh dari interaksi dengan rakyat, khususnya dengan kelompok marjinal, yang seringkali mengalami penindasan dan dikorbankan demi sebuah "kemajuan".

Kami belajar, bahwa komunitas bukanlah sebuah entitas yang statis. Dan pemberian dukungan, seringkali menimbulkan peningkatan kebutuhan serta pergeseran kepentingan, bahkan dapat pula menimbulkan potensi konflik baru. Karena itu, integrasi berbagai strategi dibutuhkan, untuk

secara kreatif merespon “perubahan-perubahan” yang terjadi di tingkat komunitas dampingan.

Perluasaan lingkup program, proses pendampingan yang lebih serius disertai kemampuan memahami dinamika masa, sekaligus kapasitas untuk menganalisa potensi konflik yang bakal terjadi dengan adanya sebuah “intervensi” amat dibutuhkan, bagi kelompok-kelompok yang secara sadar memilih untuk berkiprah dalam bidang pemberdayaan rakyat ini. Implikasinya untuk kami sebagai organisasi pendukung (intermediary organization) adalah dibutuhkannya keluwesan - pemberian peluang yang cukup kepada mitra-mitra lapangan untuk belajar, merubah strategi dan melakukan ekspansi/perubahan aktivitas.

Pelajaran lain yang cukup penting adalah pada tataran “keberdayaan” rakyat itu sendiri. Hasil-hasil yang dicapai dari proses pemberdayaan rakyat dalam kurun waktu 6 tahun ini menunjukkan bahwa memang ada peningkatan kemampuan rakyat untuk mengkonsolidasikan dan mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya dihadapan para pengambil keputusan. Telah banyak aksi, lobby, dan pertemuan-pertemuan yang menghasilkan suara rakyat itu “didengar dan dipertimbangkan”. Namun bila dirunut lebih jauh, belum banyak keberhasilan yang bisa dikutip bila sampai pada tataran “disetujui”. Dengan kata lain, belum banyak keberhasilan yang bisa dicapai komunitas dampingan, dalam rangka mengambil hak yang tadinya dirampas dari tangan mereka.

Berbekal pada refleksi itu, YAPPIKA mencoba berfikir lebih strategis, tentang kapasitas-kapasitas yang mesti dimiliki oleh rakyat dan kelompok pendukungnya, sebagai bagian dari proses pemberdayaan. Dan kapasitas “bernegosiasi”, ternyata menjadi satu kemampuan penting untuk dimiliki. Karena itulah, YAPPIKA saat ini sedang merancang sebuah program baru, “Pengembangan Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis”, dimana didalamnya tercakup strategi-strategi peningkatan kapasitas rakyat dan kelompok dampingannya dalam rangka mengkonsolidasikan gagasan, mengartikulasikan kepentingan, sekaligus menegosiasikan kepentingan-kepentingan itu dengan para pengambil keputusan. Kami sadar, bahwa begitu banyak kepentingan diluar sana yang saling berinteraksi dan berkompetisi. Dan kemampuan negosiasi menjadi salah satu prasyarat untuk memenangkan kompetisi.





## Profil YPR Bulukumba Berguru Pada Rakyat

**Y**ayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Bulukumba memulai pengorganisasian rakyat melalui pengamatan aktivitas rutin masyarakat. Mereka membaur di tengah kehidupan masyarakat, baik di sawah, di rumah-rumah penduduk, di pasar, di masjid, di pesta bahkan di angkutan kota pun mereka mencoba menjalin pertemanan. Sebuah tempat persewaan komputer dipilih oleh YPR Bulukumba sebagai basis untuk memulai berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Diskusi/pertemuan dengan masyarakat mereka lakukan di tempat ini. Topik yang diangkat

bermula dari hal yang ringan, seputar hal-hal yang sehari-hari dilakukan. Lambat laun, topik diskusi semakin meluas dan serius. Persoalan-persoalan negara, pemerintah, politik, ekonomi, bahkan sampai pada hak-hak masyarakat sipil yang harus diperoleh dari negara masuk menjadi topik diskusi. Berbagai pertanyaan dimunculkan pada tiap diskusi maupun obrolan sebagai strategi untuk menggugah kesadaran masyarakat akan berbagai kondisi yang mereka hadapi dan ada di sekitar mereka.

Seiring dengan berjalannya waktu, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dalam diskusi-diskusi maupun obrolan ringan, ternyata berhasil meningkatkan kesadaran dan sikap kritis masyarakat dalam melihat berbagai ketidakadilan yang diterimanya. Kasus penolakan membayar pajak dan tuntutan untuk perbaikan jalan misalnya, bisa jadi contoh makin tingginya sikap kritis rakyat yang diejawantahkan dalam bentuk aksi. Setelah melalui beberapa kali negosiasi, akhirnya pemerintah mengabulkan permintaan masyarakat desa untuk menikmati jalan yang beraspal. Contoh lain adalah munculnya perlawanan kaum tani akibat rendahnya harga beras dan melonjaknya harga sarana produksi pertanian, penggusuran lahan pertanian, penolakan penanaman kapas transgenik, surat protes yang ditujukan kepada Bupati dan DPRD atas kebijakan publik yang dinilai tidak tepat. Kini kesadaran dan sikap kritis masyarakat telah masuk di hampir seluruh desa di Kabupaten Bulukumba. Bagi YPR, Masyarakat (rakyat) adalah guru sejati. Rakyat pun bisa mendidik.



## Profil YPBF

# Radio Komunitas & Deklarasi Serikat Petani Kabupaten Sikka

**B**agi masyarakat petani Sikka yang belum tersentuh teknologi internet dan TV kabel, radio menjadi media strategis untuk mengikuti berbagai informasi. Melihat kondisi tersebut, Yayasan Pengembangan Bambu Flores (YPBF) mengemas program konservasi keanekaragaman hayati melalui pengembangan radio komunitas dan pendampingan teknis di lapangan. Berbagai permasalahan yang dialami oleh petani pun diangkat melalui radio komunitas ini.

Lebih dari 50.000 keluarga yang berdomisili di 11 kecamatan di kabupaten Sikka berhasil dijangkau. Keberadaan radio komunitas dibarengi dengan kegiatan pendampingan lapangan secara intensif. Berbagai diskusi dan pertemuan kelompok-kelompok tani sering digelar. Selain membicarakan berbagai permasalahan petani, YPBF juga memfasilitasi pengembangan sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan serta pengembangan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Keberadaan radio komunitas dan berbagai diskusi di kelompok-kelompok tani ternyata mampu mendorong kesadaran para petani akan hak-haknya, juga memunculkan

semangat untuk berorganisasi dan membangun komunitas yang lebih besar. Maka, melalui Kongres Petani pada tanggal 2 Februari 2002, dideklarasikan berdirinya Serikat Petani Kabupaten Sikka (SPKS). Deklarasi ini dihadiri oleh 2000 petani, juga Bupati Sikka yang secara resmi membuka acara tersebut.

Keberhasilan perjuangan petani Sikka juga diikuti oleh terbangunnya koalisi Ornop yang solid di kabupaten Sikka. Koalisi yang terdiri dari 10 Ornop ini, masing-masing berbagi peran untuk mendorong gerakan petani Sikka. Berbagai dukungan muncul terhadap lahirnya SPKS, diantaranya berasal dari kalangan LSM, tokoh masyarakat, instansi-instansi dan bahkan Federasi Serikat Petani Indonesia. Para pendukung ini dapat menjadi salah satu basis penguatan organisasi petani untuk menjawab persoalan-persoalan yang nampaknya di luar jangkauan petani saat ini, seperti ekonomi, politik, hukum dan budaya. Dukungan dari berbagai pihak adalah salah satu kunci untuk menjaga dan menguatkan gerakan mereka di masa depan.



## Profil YDUA Pemberdayaan Pemulung di Aceh

*Yappika telah menjadi partner yang baik dalam mendukung agenda YPR Bulukumba, terutama dalam pengembangan strategi menumbuhkan kepercayaan rakyat untuk bergerak maju.*

*Pendekatan yang digunakan Yappika sangat kekeluargaan, baik pada saat berhubungan dengan para staf YPR maupun dengan masyarakat dampingan YPR secara langsung.*

*Keterbukaan Yappika memudahkan YPR untuk melihat kerangka program maupun tujuannya secara lebih luas.*

**Armin Salassa**  
Yayasan Pendidikan Rakyat Bulukumba  
Sulawesi Selatan

**Y**ayasan Daur Ulang Aceh (YDUA), sebuah LSM di Banda Aceh, mencoba mengorganisasi pemulung agar mereka mempunyai nilai tawar yang layak bagi pekerjaannya, yang seringkali dipandang rendah oleh masyarakat, pun oleh orang-orang yang menekuninya sendiri.

Strategi yang digunakan adalah mendorong terbentuknya lembaga keuangan dengan mendirikan Unit Simpan Pinjam (USP) yang diberi nama Baitul Makmur. USP ini berfungsi untuk mengelola dana simpan pinjam para anggota KSM yang berprofesi sebagai pemulung tersebut. Sebanyak 316 orang anggota KSM telah dilayani oleh USP ini, bahkan mereka telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 40.259.000,- untuk menambah modal USP Baitul Makmur.

Keberhasilan pemberdayaan para pemulung ini menarik minat masyarakat dari sektor informal lainnya untuk turut bergabung. Mereka adalah para pedagang kecil (kios), pedagang sayuran, pedagang kaki lima, tukang jahit, dll. Dalam periode dua tahun, sebanyak 34 kelompok dari 12 kelompok pada awal pembentukannya, bergabung dalam USP Baitul Makmur yang didampingi oleh YDUA.

*Perjalanan kita ke demokrasi yang nyata masih jauh, semoga YAPPIKA dalam tahun-tahun mendatang tetap memberikan sumbangannya dalam isu demokrasi dan gerakan masyarakat sipil.*

**Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ**  
Direktur Program Pascasarjana  
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

# A dvokasi/Dialog Kebijakan

Cukup banyak kegiatan advokasi/dialog kebijakan yang dilakukan pada periode 2002/2003 ini, antara lain: advokasi kebijakan untuk RUU Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, RUU Koperasi, perbaikan UU Yayasan, dan upaya-upaya untuk mendorong penyelesaian konflik Aceh dan Papua melalui jalan damai. Dalam melakukan berbagai aktivitas itu, YAPPIKA memang tidak bekerja sendirian. Seluruh kegiatan dilaksanakan bersama Koalisi ORNOP, yang terbentuk karena kepedulian bersama. Kelahiran beragam koalisi atau aliansi strategis dalam rangka menggulirkan gagasan perubahan kebijakan menjadi strategi bagi banyak organisasi masyarakat sipil (OMS) akhir-akhir ini, dengan dilandasi kesadaran bahwa keberhasilan kerja advokasi hanya bisa dicapai dengan dukungan banyak pihak.

Melalui serangkaian diskusi diantara tim substansi Koalisi, disertai pertemuan dengan anggota parlemen dan tim kerja pemerintah, dan penyelenggaraan berbagai forum-forum publik untuk mendapat masukan dari kalangan yang lebih luas, dihasilkan 3 kertas posisi. Yaitu yang berkenaan dengan penyelesaian konflik Aceh dan Papua melalui jalan damai, kepentingan partisipasi publik dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, serta "Gerakan Demokratisasi untuk

## Bersama Rakyat, Membuat Kebijaksanaan Lebih Bermakna

Esensi pokok dari demokrasi adalah "partisipasi". Dan salah satu arena partisipasi penting di negara demokratis adalah dalam proses penyusunan kebijakan publik. Atas usulan inisiatif 33 anggota DPR, saat ini sedang digodok sebuah RUU TCP3 (Rancangan Undang-undang mengenai Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan), yang intinya memuat tentang proses dan mekanisme pembuatan sebuah UU. Kelemahan utama substansi RUU ini terletak pada kurang signifikannya peluang yang disediakan bagi partisipasi warga negara di dalam proses pembuatan aturan/kebijakan publik. Padahal, ketika sebuah kebijakan publik disahkan dan diimplementasikan, pasti punya implikasi pada kita semua.

Berangkat dari pemikiran diatas, dibentuk Koalisi ORNOP untuk Kebijakan Partisipatif. Advokasi Koalisi ditujukan untuk menawarkan alternatif atas RUU TCP3 (the



Bill on “Law Making Process”), dalam rangka memberikan jaminan hukum bagi warga-negara untuk dapat terlibat secara aktif, mengkritisi, memberi masukan, dan mengusahakan perbaikan selama proses pembuatan sebuah kebijakan/peraturan publik. Sebuah kertas posisi sedang dirumuskan, dan kampanye serta pendekatan ke berbagai pihak juga tengah digalakkan.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, koalisi didukung oleh Yayasan TIFA, AUSAID, The Asia Foundation, Ford Foundation, CSSP, NDI serta PPD. Advokasi Koalisi tentu tak akan efektif tanpa dukungan publik. Untuk itulah, Koalisi ORNOP untuk Kebijakan Partisipatif mengajak masyarakat bersama-sama melakukan tekanan kepada parlemen, untuk memastikan agar kita, sebagai warga-bangsa, memperoleh hak kita, terlibat, berpartisipasi, dalam proses penyusunan kebijakan/peraturan publik.

Koperasi”. Selain itu, dilakukan pula 2 penelitian lapang tentang konflik di 2 lokasi, Jakarta dan Poso. Rencananya, hasil 2 penelitian lapang itu akan dibukukan sebagai media belajar tentang proses-proses resolusi konflik.

YAPPIKA sadar bahwa pembuatan kertas posisi bukan hasil akhir dari aktivitas advokasi. Tantangan terbesar terletak pada upaya mempengaruhi banyak pihak untuk turut mendorong perubahan kebijakan atau lahirnya kebijakan baru yang lebih berkeadilan. Menjadi pelajaran penting bagi banyak organisasi masyarakat sipil, termasuk YAPPIKA, bahwa advokasi yang berhasil perlu ditopang dengan kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi yang prima.

Melalui dana taktis YAPPIKA berkontribusi pula pada beberapa kegiatan, yaitu:

- Lokakarya dan temu seniman Aceh-Jakarta
- Legislative Drafting Training di Aceh
- Pertemuan jaringan ORNOP Aceh dalam rangka membangun sinergi dan prakarsa perdamaian di Aceh
- Aksi dalam rangka memperingati Hari Pembaruan Agraria

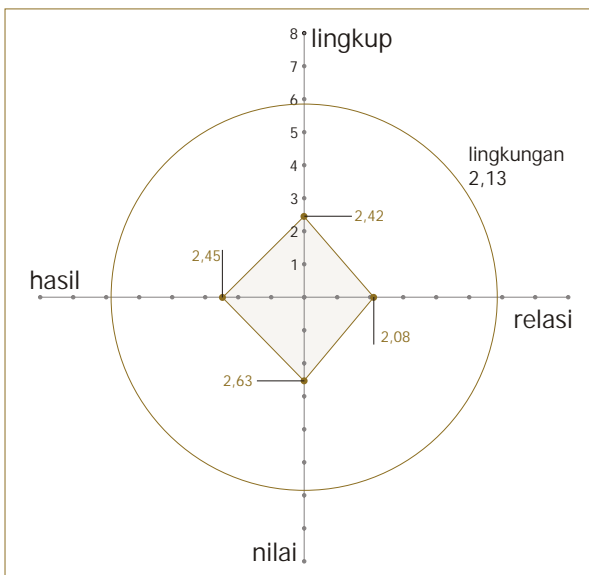


## Kondisi Masyarakat Sipil Indonesia Kurang Sehat

**M**asyarakat sipil sedang ber-refleksi! Mengukur kekuatan dan kelemahan diri, pun sumbangan yang diberikan pada proses demokratisasi. Alat ukur yang digunakan adalah Indeks Masyarakat Sipil (IMS) yang dikembangkan oleh CIVICUS, sebuah organisasi nirlaba tingkat internasional yang melakukan advokasi untuk penguatan masyarakat sipil.

Banyak kalangan terlibat dalam proses refleksi ini. Mereka mewakili serikat buruh, petani, nelayan, koperasi, perguruan tinggi, ormas, NGO, organisasi etnis, organisasi keagamaan, organisasi profesi, wartawan, radio dan organisasi mahasiswa yang berasal dari seluruh bagian di Indonesia. Di samping masyarakat sipil, hadir pula stakeholder kunci seperti wakil pemerintah, pengusaha, DPR/D, Militer dan Partai Politik. Keberagaman ini juga dapat dilihat dari berbagai unsur organisasi yang hadir, mulai Islam kanan garis keras seperti FPI (Front Pembela Islam) sampai organisasi kiri yang berasas sosialis seperti PDS (Persatuan Demokratis Sosialis).

Workshop dilakukan di 6 regio, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Sulawesi-Papua, NTT-NTB dan Jabotabek. Dari workshop regional itu, terpilih masing-masing 10 orang wakil, untuk melanjutkan proses refleksi di tingkat nasional.



Hasilnya, secara nasional, diukur dari skala 1-4, maka masyarakat sipil Indonesia cuma memperoleh angka 2,34. Ini berarti masyarakat sipil Indonesia “kurang sehat”. Sejumlah rekomendasi aksi dihasilkan dalam lokakarya nasional mencakup: memberikan pendidikan politik kepada publik, penguatan organisasi masyarakat sipil, membangun hubungan dan komunikasi yang harmonis antar OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), protes atas dominasi peran pasar, pengawasan terhadap peran pemerintah, pengorganisasian di tingkat basis serta pendidikan “umum” (budi pekerti, HAM, gender). Rekomendasi ini menunjukkan

bahwa tantangan berat untuk mewujudkan masyarakat sipil yang sehat ada di depan kita. Kita mungkin dapat mewujudkannya jika kita membangun kekuatan secara bersama.





## Mengusung Ekonomi Kerakyatan Bersama Gerakan Koperasi

**K**operasi merupakan sistem ekonomi kerakyatan yang dipandang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Saat ini telah dihasilkan setidaknya empat draft RUU Koperasi yang masing-masing diajukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Dekopin, LSP2I an Tim TPP-KUKM. Banyak titik rawan yang harus dicermati dalam beberapa draft itu, khususnya untuk perbaikan ke depan.

Didorong oleh kondisi ini, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), koperasi-koperasi dan lembaga lainnya yang mempunyai kepedulian sama, membentuk Koalisi Ornop untuk Gerakan Koperasi. Koalisi bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap proses-proses pembentukan instrumen hukum koperasi serta pelaksanaannya, guna mewujudkan fungsi koperasi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sampai sejauh ini, Koalisi telah menyusun sebuah kertas posisi (position paper), berisi gagasan dan pandangan tentang permasalahan yang dihadapi koperasi dan solusinya.



# Sistem Pendukung



**S**istem pendukung adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ketiga pilar strategi program Yappika setelah pemberdayaan rakyat, advokasi dan kampanye publik. Dimana satu pilar saling mendukung pilar yang lain. Melalui riset-riset kebijakan dan riset lainnya sistem pendukung secara garis besar ditujukan untuk meningkatkan kapasitas mitra dalam berorganisasi dan merancang strategi program. Yappika juga menyediakan fasilitas pelatihan-pelatihan, magang dan asistensi teknis untuk meningkatkan keahlian mitra-mitranya.

Penerbitan majalah Aliansi secara rutin maupun penerbitan buku-buku hasil riset, pengelolaan database yayasan bukan dimaksudkan sebagai dokumentasi belaka. Kami berharap berbagai terbitan yang telah dipublikasikan oleh Yappika dapat menjadi bahan rujukan serta dapat memberi inspirasi bagi banyak pihak, baik itu pengambil keputusan, jurnalis maupun kalangan akademisi.

## Mempraktekkan Nilai-nilai

*Saya telah berinteraksi dengan YAPPIKA dalam berbagai kegiatan sejak beberapa tahun yang lalu, termasuk dalam keanggotaan TCP3, sebagai fasilitator Civil Society Index, dan fasilitator untuk proses OCA dengan seluruh staff.*

*Hal paling berkesan tentang YAPPIKA bagi saya adalah bagaimana organisasi ini beserta stafnya mampu mempraktekkan nilai-nilai yang diperjuangkannya. Organisasi masyarakat sipil yang efektif harus mampu menterjemahkan komitmen terhadap demokrasi di dalam lingkungan internalnya sendiri, di dalam setiap relasi, serta di dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat dan negara.*

*YAPPIKA telah melakukan semua itu secara konsisten dan sepuh hati. Inilah keunikan YAPPIKA. Prinsip transparansi, partisipasi dan kesetaraan gender dapat dilihat di seluruh aspek kerja mereka.*

**Greg Rooney**  
Program Masyarakat Sipil  
ACCESS

## Dinamika Sebuah Organisasi Jaringan

*Sejak berdirinya, Yappika telah menunjukkan dinamikanya sebagai sebuah organisasi jaringan, baik dalam kiprah organisasionalnya maupun di dalam memungut isu-isu strategis yang relevan bagi publik.*

*Yappika semoga terus berada dalam tradisi dinamisnya sehingga dapat melanjutkan peran kepeloporannya. Terutama dalam memperkuat jaringan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan advokasinya.*

**Zaim Saidi**  
Direktur Eksekutif PIRAC  
(Public Interest Research  
& Advocacy Center)



## Pemantauan dan Sosialisasi UU Yayasan

**S**ebagai kelanjutan advokasi terhadap UU Yayasan, Koalisi Ornop yang beranggotakan sekitar 80 lembaga bersepakat melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap pelaksanaan UU Yayasan tersebut. Salah satu kegiatan pemantauan yang dilakukan adalah pembuatan data base yayasan. Penanggung jawab pembuatan data base ini adalah YAPPIKA yang memperoleh dukungan dari National Democratic Institute (NDI).

Data base yayasan dibuat dalam bentuk web site yang dapat diakses oleh publik. Data base yayasan yang di-lounging pada bulan November 2002 ini menyajikan informasi mengenai yayasan dalam bentuk profil lembaga, bisnis yang dikelola oleh yayasan, berita-berita seputar yayasan dan berbagai masalah yang timbul karena implementasi UU Yayasan, hasil-hasil penelitian, makalah, dan buku-buku referensi mengenai yayasan. Jenis yayasan yang ada dalam database adalah yayasan keagamaan, yayasan ornop, yayasan militer, yayasan pemerintah, yayasan perseorangan, dan yayasan perusahaan. Terdapat sekitar 100 perusahaan dalam database yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh yayasan, dan hampir semuanya dimiliki oleh yayasan militer.

Selain pemantauan, koalisi juga melakukan sosialisasi UU Yayasan di Banda Aceh, Medan dan Lampung dalam bentuk seminar. Kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan dari Yayasan TIFA. Sosialisasi juga dilaksanakan melalui talk show di radio 68 H, menjadi pembicara pada sebuah seminar di CSIS dan diskusi di Kalyanamitra.



# Kampanye Publik

**S**elama kurun waktu 2002/2003, Yappika cukup gencar melakukan kampanye untuk memperoleh dukungan publik, guna terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis, independen, mandiri dan menghargai pluralisme sebagaimana tercantum dalam visi Yappika. Kampanye yang dilakukan diantaranya : Peluncuran Buku Indonesia Menapak Demokrasi bekerjasama dengan Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) & Harian Sinar Harapan, ikut terlibat dalam Pertanggungjawaban kepada Publik yang dilaksanakan oleh JARI, Festival Pluralisme-Rayakan Keberagaman Kita (Rakk-Fest 2002), Peluncuran buku Otonomi Komunitas bekerjasama dengan CSIS, kegiatan Peringatan Hari Anti Penyiksaan serta Peluncuran buku foto Jalan Panjang Menuju Demokrasi.

Berbagai masukan tentang persoalan-persoalan yang marak ditengah masyarakat telah diperoleh dari diskusi-diskusi dan aktifitas-aktifitas yang dilakukan dalam beberapa kegiatan di atas. Masukan-masukan tersebut menjadi catatan penting yang menjadi bahan pemikiran dalam berbagai program Yappika. Dengan demikian kampanye publik juga bermakna membangun transparansi agar khalayak tahu dan paham tentang apa Yappika dan gagasan utama apa yang didorongnya, sekaligus memberi peluang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dan berpartisipasi. Interaksi dengan khalayak akan mewarnai perjalanan Yappika dalam memperoleh dukungan dan membangun kepercayaan publik, sebab tanpa dukungan publik gerak langkah Yappika tak akan pernah berarti apa-apa.

## RAKK - FEST 2002

### Berdamai Dengan Perbedaan

Yappika bersama Yayasan Panca Dian Kasih (Padi Kasih) menyelenggarakan sebuah festival bertajuk Festival Pluralisme Rayakan Keberagaman Kita (RAKK Fest 2002) yang dilaksanakan pada tanggal 3 & 4 Agustus 2002 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Festival ini bertujuan untuk mencoba mencari akar persoalan konflik di Indonesia serta mengkampanyekan keberagaman sebagai sebuah kenyataan.

Beberapa kegiatan digelar dalam festival, diantaranya adalah pentas seni dan festival makanan daerah, pameran beberapa lembaga, lomba mewarnai yang diikuti oleh anak-anak serta diskusi tentang Kekerasan Teologis dan Berdamai dengan Perbedaan yang dilihat dari sudut pandang Psikologi, Ideologi, Agama, dan Etnisitas. Sejumlah pembicara hadir dalam diskusi tersebut, di antaranya adalah Romo Haryanto, Pendeta Silvana Ranti, Budi Munawar dari Paramadina serta Otto Syamsudin Ishak.





## Sebuah Potret Perjuangan Rakyat Peluncuran Buku Foto

**B**uku foto Jalan Panjang Menuju Demokrasi diluncurkan kepada publik di penghujung akhir tahun, 18 Desember 2002, bertempat di Gedung Patra Jasa Jl. Gatot Subroto Jakarta. Peluncuran buku foto diwarnai dan dimeriahkan oleh orasi politik dari Arbi Sanit, Karlina Leksono, dan Rasdullah; pembacaan puisi oleh Trie Utami; dan diakhiri pertunjukan “wayang-wong” alternatif-interaktif oleh Sudjiwo Tedjo yang mengisahkan tentang kepemimpinan negara.



*“Demokrasi bukan kata benda! Demokrasi bermakna kerja, yang masih perlu terus diasuh dan diasah demi pemenuhan kepentingan bersama. Gerakan masyarakat sipil Indonesia, oleh karenanya tak boleh mati, dan tak akan pernah mati. Karena sejarah mengajarkan, bahwa tiap-tiap individu, sekecil-semarjinal apapun dia, mampu berkontribusi terhadap sebuah perubahan besar. Perubahan itu ada, karena kita ada!”*

# Hibah & Proyek yang keluar selama PPD I

## Dispersed Grants & Projects for PPD I (1997- 2002)

### Penguatan Forum Nasional / National Forum Strengthening

Forum LSM DIY / NGO Forum DIY (Yogyakarta)  
Rp. 588.358.064,-

Memperkuat kegiatan Forum dengan kegiatan advokasi dan lobby, fasilitasi untuk Strategy Planning, pendidikan hak politik masyarakat, pertemuan rutin, pelayanan terhadap anggota forum, dan dana operasional.

*To strengthen the NGO Forum to conduct advocacy and lobby activities on a wide range of issues, provide civic education training to member organizations, conduct routine member meetings, provide services to members and to contribute to operational costs.*

FIK-Ornop Sulawesi Selatan / FIK NGO Forum South Sulawesi (Makassar)  
Rp. 658.093.160,-

Memperkuat kegiatan Forum dengan kegiatan advokasi dan lobby, fasilitasi untuk Strategy Planning, dialog kebijakan dan publik, pendidikan hak politik masyarakat, seminar tentang otonomi daerah, pertemuan rutin, pelayanan terhadap anggota forum, dan dana operasional.

*To strengthen the Forum to conduct advocacy and lobby activities, disseminate information, facilitate civic education, implement a seminar on regional autonomy, provide services to members, and support to operational costs.*

FSSM LSM-NTT / Forum NTT (Maumere)  
Rp. 671.740.130,-

Memperkuat kegiatan Forum melalui kampanye, memberi pendidikan hak politik masyarakat, melakukan pertemuan rutin, pelayanan terhadap anggota forum, fasilitasi untuk Strategy Planning, dan pelatihan terhadap kepemimpinan yang baik serta dukungan dana operasional.

*To strengthen the Forum in East Nusa Tenggara to conduct campaigns, provide civic education, hold regular members meetings, conduct seminars on various issues, such as indigenous land rights in NTT, provide service to members, conduct workshops on effective leadership and support to operational costs.*

Foker LSM - Papua / Foker-Papua (Jayapura)  
Rp. 499.089.360

Memperkuat kegiatan Forum melalui kampanye untuk rekonsiliasi dan membangun perdamaian antar etnis, melakukan pertemuan rutin, pelayanan terhadap anggota forum, serta dialog publik dan dukungan dana operasional.

*To strengthen Forum activities in West Papua to campaign on peaceful reconciliation of conflict between different ethnic groups, hold regular member meetings, provide services to the members, facilitate public dialogues and support to operational costs.*

Penguatan Forum LSM Aceh  
Rp. 403.844.942

Memperkuat kegiatan forum melalui pelayanan terhadap anggota forum, melakukan pertemuan rutin, fasilitasi untuk Strategy Planning, dialog publik, peningkatan kapasitas staf forum dan anggota, pertemuan-pertemuan untuk revitalisasi institusi adat serta dana operasional

*To strengthen Forum activities in Aceh to provide services to the members, regular member meetings, facilitate for strategic planning, facilitate public dialogues, capacity building for staff and members, and support to operational costs.*

Koalisi NGO HAM / NGO Human Rights Coalition (Banda Aceh)  
Rp. 95.662.100,-

Memberi dukungan terhadap para Ornop, penggalian rumusan resolusi konflik, melakukan dialog dan pertemuan antar berbagai pihak untuk mencari penyelesaian konflik di Aceh.

*To assist the Forum in providing support to other NGOs, identify conflict resolution strategies, and hold dialogues and meetings between various stakeholders in order to identify potential solutions to the on-going conflict in Aceh.*

---

## Pendidikan Masyarakat / Community Education

YAPDA Aceh and Madika (Aceh)

Rp. 109.720.259,-

Advokasi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan Kegiatan Pelaksanaan Kongres FROKLA Ke II. *Advocating for Sustainable Use of Natural Resources & FROKLA II Congress.*

SANRES NTT (Maumere)

Rp. 259.038.967,-

Program meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan advokasi kebijakan terhadap isu-isu pengelolaan sumber daya alam di NTT.

*Increasing community's ability to conduct policy advocacy on issues related to community-based natural resource management issues in East Nusa Tenggara.*

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama D.I. Yogyakarta (LKPSM NU DIY) (Yogyakarta)

Rp. 194.141.083,-

Program untuk mengembangkan kesadaran kritis dalam masyarakat melalui seni budaya pesantren.

*Development of community critical awareness through Pesantren art and culture.*

Yayasan Kesejahteraan Fatyat (Yogyakarta)

Rp. 227.648.095,-

Program penyadaran gender untuk aktivis pemuda Nahdatul Ulama -Yogyakarta.

*Gender awareness program for youth activists of Nahdatul Ulama (a mass-based Islamic organization) in Yogyakarta.*

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Nusra (Maumere)

Rp. 190.008.218,-

Program pemetaan partisipatif untuk mendukung kegiatan advokasi dan melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

*Participatory community mapping for advocacy on the involvement of indigenous communities in natural resource management.*

Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) (Banda Aceh)

Rp. 256.101.166,-

Program pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan gender.

*Provide education and increase community awareness about gender inequality.*

Jaringan Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat (SULOH) (Banda Aceh)

Rp. 263.519.316,-

Program pengembangan dan penguatan organisasi tani Aceh melalui pendidikan dan penerbitan media alternatif.

*Empowerment and strengthen farmer organizations by providing education and through the publication of an alternative media developed by farmers for farmers.*

Yayasan Bina Sejahtera (YBS) (Lembata)  
Rp. 78.186.513,-  
Program membangun pemerintah lokal yang demokratis dalam fokus membangun pemerintah desa dan badan perwakilan desa di Kabupaten Lembata.  
*For the program to build democratic local governance, by focusing on building a village-level government and village representative body in Lembata District, NTT.*

Yayasan Pendidikan Rakyat (Bulu Kumba)  
Rp. 57.503.010,-  
Program penguatan organisasi masyarakat sipil dalam era otonomi daerah di Kabupaten Bulu Kumba Sulawesi Selatan  
*For the program to strengthen civil society organizations in the context of regional autonomy in Bulu Kumba District, South Sulawesi.*

Yayasan Pengembangan Bambu (Maukere)  
Rp. 156.651.801,-  
Program konservasi keanekaragaman hayati melalui program radio komunitas untuk memberi pendidikan lingkungan hidup dan advokasi hak-hak petani dan hak atas sumber daya alam.  
*For the biodiversity conservation program, using community radio as a media to provide environmental education and advocate on issues related to user rights of natural resources and farmers rights.*

Yayasan Lembaga Konsumen-Sulawesi Selatan (Makassar)  
Rp. 42.046.134,-  
Studi kasus yang bertujuan untuk mempromosikan perencanaan anggaran yang bersifat partisipatif dan transparan di Kabupaten Pangkep, Sul Sel.  
*To conduct a case-study aimed at promoting district-level budget planning that is more participatory and transparent in Pangkep, South Sulawesi.*

Yayasan Peduli Sesama (Kupang)  
Rp. 7.500.000,-  
Menerbitkan buku yang berjudul "Mengembalikan Kedaulatan Rakyat".  
*To publish a book entitled "Mengembalikan Kedaulatan Rakyat" (Return People's Sovereignty).*

LAPERA (Yogyakarta)  
Rp. 228.946.115,-  
Program Pendidikan Masyarakat Sipil, dan peningkatan partisipasi inisiatif masyarakat dalam otonomi daerah di sekitar pedesaan wilayah Yogyakarta.  
*Civil Society Education Program, Increasing People's Participation and Initiatives in Local Autonomy*

LEKMAS, Sulawesi Selatan (Makassar)  
Rp. 57.670.168,-  
Mengenal Model Pendampingan Komunitas Suatu Pengalaman ORNOP Sulawesi Selatan.  
*Empowering the Construction Worker's Group, experience with NGO at South Sulawesi.*

CORDOVA (Banda Aceh)  
Rp. 10.632.500,-  
Riset partisipatif untuk mengidentifikasi kondisi ekonomi pedesaan di Aceh.  
*Participatory Research to Identify the Economic Status in Villages in Aceh*

---

## Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat/ Community-based Natural Resource Management

Yayasan Tumbuh Mandiri (Makassar)  
Rp. 181.647.170,-  
Program Pengembangan Desa Pesisir yang berwawasan

lingkungan (Konservasi Hutan Bakau yang mengalami kerusakan) di desa Kuru-kuru Kec. Soppeng Riaja , Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan

*Environmental Development of Coastal Villages (Conservation of Damaged Mangrove Forest) at Village Kuru-kuru Village, Soppeng Riaja , Barru, South of Sulawesi*

Yayasan Bina Sejahtera (Lembata)

Rp. 198.116.892,-

Program pengembangan pertanian terpadu untuk 10 desa di pulau Lembata-NTT.

*For the program to develop integrated farming in 10 villages on Lembata Island, NTT.*

Yayasan Lembaga Konsumen-Sulawesi Selatan (Makassar)

Rp. 102.996.821,-

Program Pengembangan Usaha Pertanian Sayuran Organik di Wilayah Pinggiran Kota Makassar

*For the program to develop organic vegetable farming initiatives and assist with product marketing for several areas surrounding the city of Makassar.*

YALI (Papua)

Rp. 107.092.156,-

Program Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Hayati secara Berkelanjutan di masyarakat Adat Memberamo

*For the utilization and Management of Natural Resources in Memberamo Traditional Community*

Yayasan Hivlak (Tual)

Rp. 238.717.477,-

Program Pendidikan Hukum dan Lingkungan Hidup Laut dan Pesisir Bagi Masyarakat Pesisir Pantai Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara

*Legal and Environmental Education Program for Coastal Communities in Kei Kecil Island, Southeast Maluku District*

Yayaan Bina Swadaya Mandiri (Ende)

Rp. 167.432.210,-

Program Pemanfaatan Lahan Tidur Untuk Pengembangan Pertanian Terpadu

*For the program to develop community-based integrated farming in Ende, NTT.*

Yayasan Karya Swadaya (Maluku Tenggara)

Rp. 53.913.900,-

Kontribusi terhadap program agro-forestry untuk membantu melindungi sumber daya alam.

*To contribute to developing an agro-forestry system as a means of helping to conserve natural resources in Southeast Maluku.*

Yayasan Satyapila (Aceh Tenggara)

Rp. 92.407.193,-

Program Pemberdayaan Masyarakat Marginal Melalui Usaha Produktif dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

*To assist with community empowerment activities and increase community skills needed to manage natural resources sustainably.*

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia-Papua (Jayapura)

Rp. 168.087.333,-

Program Pelestarian Tanaman Tradisional di Daerah Pedesaan Jayapura, Papua Barat

*For the program to develop a traditional medicinal garden, while at the same time helping to preserve traditional indigenous knowledge in Jayapura District, West Papua.*

Yayasan Agape (Yogyakarta)

Rp. 40.060.000,-

Program Usaha Memulihkan Kesuburan Lahan Pertanian dan Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Budidaya Tanaman Jarak Keyar dan Empon-empon di Dusun Pudak, Desa Giriwungu, Kec Panggang Kab Gunung Kidul Yogyakarta

*For the program to restore soil fertility and increase farmers' income by cultivating jarak and empon-empon plants in Puduk village, Gunung Kidul - Yogyakarta.*

Yayasan Rumpun Bambu (Aceh)

Rp. 114.533.156,-

Program Bina Usaha Konservasi Melalui Penguatan Lembaga Adat dan Peningkatan Peran Perempuan  
*Conservation through Strengthening Traditional Community Institutions and Increasing the Role of Women*

Yasma (Aceh)

Rp. 108.378.008,-

Program Konservasi Alam Pada Lahan Kritis di Aceh  
*Critical Land Conservation Program in Aceh*

Yayasan Silo (Papua Barat)

Rp. 69.288.377,-

Program Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat di Kecamatan Wamena dan Kurima  
*Participatory Program for the Development and Management of Natural Resources*

Yayasan Hualopu (Maluku)

Rp. 18.574.282,-

Program Pemberdayaan Gender dalam Upaya Pengelolaan Sumberdaya untuk Mendukung CBCRM pada Sub-Gugus Lease Kabupaten Maluku Tengah  
*Gender Empowerment to Support Natural Resource Management in Lease Island Group in Central Maluku District*

Yayasan Ohoivur (Maluku)

Rp. 13.986.000,-

Program Pemetaan masyarakat sebagai Media untuk Pengelolaan dan Pendokumentasian Obat-obatan Tradisional  
*Community Mapping Program to develop the Management and Documentation of Traditional Medicines*

## Pembangunan Ekonomi Berbasis Masyarakat/ Community-based Economic Development

BEKATIGADE (Yogyakarta)

Rp. 225.046.000,-

Program untuk pemberdayaan perempuan melalui dukungan terhadap usaha kecil, fasilitasi jaringan antara sesama kelompok usaha perempuan

*For the program aimed at empowering women by supporting the development of small business enterprises for women and facilitating networking among women's business groups.*

Yayasan Tenko Situru (Tana Toraja)

Rp. 230.545.000,-

Program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan untuk usaha petani sutera untuk membangun usaha kecil dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga  
*Small Business Development for Silk Farming Business to Improve Family Welfare*

WALDA (Tana Toraja)

Rp. 51.900.000,-

Program untuk bantuan kelompok usaha kecil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta membangun jaringan usaha kecil tersebut  
*Capital Accumulation as a Component of a Territorial System Network Development Program*

Yayasan Kolo Hunu NTT (Kupang)

Rp. 80.000.000,-

Program untuk bantuan kelompok melalui usaha kecil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta membangun komunitas kelompok swadaya masyarakat  
*Income Generating Program via Husbandry and Small Credit Scheme for self-help community groups (KSM)*

Yayasan Membagi Kasih NTT (Atambua)  
Rp. 107.725.000,-  
Program untuk bantuan kelompok usaha kecil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta membangun jaringan usaha kecil  
*For the program to assist small groups to increase their economic welfare through the development of a small business network that produces mattresses.*

Yayasan Bina Mandiri NTT (Atambua)  
Rp. 83.898.650,-  
Program untuk bantuan usaha kecil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi untuk para nelayan  
*Small Business and Co-operative Development Program for Fisherman*

Yayasan Bina Mandiri Papua (Fakfak)  
Rp. 81.253.000,-  
Program untuk bantuan kelompok usaha kecil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta mengembangkan usaha kecil dimaksud  
*Small Business and Co-operative Development Program*

Yayasan Agape (Yogyakarta)  
Rp. 52.175.000,-  
Dukungan akhir untuk 2 tahun program yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan perempuan dan membangun skema kredit serta aktivitas peningkatan kapasitas  
*Income Generating Program for Women through Credit scheme and Skills Development*

Yayasan Bina Mandiri (Faf-Fak)  
Rp. 13,188,000,-  
Bantuan untuk membangun usaha kecil dan koperasi lokal di Fak-fak Papua Barat  
*To assist with the development of small enterprises and local cooperatives in Fak-Fak, West Papua.*

Yayasan Peduli Sesama (Kupang)  
Rp. 117.205.000,-  
Meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui skema kredit dan usaha koperasi kredit  
*To increase community welfare by developing community credit unions and credit schemes.*

YAKARMANI Yay. Karya Mandiri Indonesia Maluku Tenggara (Tual)  
Rp. 153.893.750,-  
Program untuk menghasilkan pendapatan komunitas lokal dan membangun skema kredit komunitas di Tual - Maluku  
*For the program to generate local community income and develop community credit schemes in Tual, Maluku.*

LEKMAS (Makassar)  
Rp. 50.731.500,-  
Penguatan serikat pekerja (buruh) melalui dukungan usaha kecil di Makassar-Sulawesi Selatan  
*To encourage small business development amongst construction workers in Makassar, South Sulawesi.*

Yayasan Daur Ulang Aceh (Banda Aceh)  
Rp. 75.000.000,-  
Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha daur ulang dan skema kredit kelompok  
*For the program aimed to increase the welfare of scavengers and develop a credit scheme among groups.*

Yayasan Bina Sejahtera (Lembata)  
Rp. 40,000,000,-  
Membangun koperasi lokal dimana para petani mempunyai toko untuk memasarkan hasil pertanian mereka dan meningkatkan kesejahteraan komunitas KSU Habang  
*To develop a local cooperative so that farmers would have an outlet to market their agricultural products and other goods, as well as, to increase community welfare.*



Yay.Darul Falah Pidie (Aceh)

Rp. 74.650.000,-

Program untuk bantuan kelompok unit simpan pinjam di Pesantren Darul Falah

*Income Generating Program through Enhancement of Loan and Saving Unit/Groups at Darul Falah Pesantren (Islamic Boarding School)*

Yayasan Lus Doan Maluku Tenggara (Tual)

Rp. 41.500.000,-

Program bantuan untuk peningkatan pendapatan dengan skim kredit untuk 10 Kelompok Swadaya Masyarakat

*Income generating program through Credit Scheme for 10 self-help community groups*

YALBINDO Sulawesi Selatan (Makassar)

Rp. 64.000.000,-

Program bantuan untuk peningkatan pendapatan kepada nelayan.

*Income generating program for fisherman through co-operative development.*

LBH NUSRA NTT (Maumere)

Rp. 17.840.000,-

Lokakarya Sistem Ekonomi Alternatif untuk aktivis Ornop dan Masyarakat lokal mitra kerja Ornop sedaratan Flores dan Pulau Lembata.

*Workshop Community Currency System for NGO Activist & partners at Flores - Lembata Island.*

---

### Dialog Kebijakan Nasional / National Policy Dialogue

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam - Jakarta)

Rp. 65.500.000,-

Meningkatkan partisipasi publik dalam kegiatan advokasi untuk proses pembuatan kebijakan tentang pertambangan.

*To assist the Mining Advocacy Network (JATAM) to increase public participation in advocating for sound mining policies.*

SAMAK Aceh (Banda Aceh)

Rp. 60.955.000,-

Meningkatkan transparansi penggunaan APBN untuk kemanusiaan dan pembangunan untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat Aceh.

*For a program aimed at increasing the transparency surrounding the use of state funds for humanitarian and development purposes in order to increase the standard of living of the Acehnese people.*

SAMAK Aceh (Banda Aceh)

Rp. 23.467.000,-

Seminar tentang tranparansi APBN dan perencanaan strategis.

*Used to conduct a public seminar on state budget financial transparency and to conduct strategic planning.*

---

LP3ES - Jakarta

Rp. 131,768,230,-

Seminar sehari & publikasi buku Mencari Konsep, keberadaan dan Strategi Masyarakat Sipil di Indonesia dan buku Ornop dan Demokrasi

*One Day Seminar and Publication of a Book on Searching the Concept, Existence and Strategies to Realize Civil Society in Indonesia and a book on NGO and Democracy*

LP3ES - Jakarta

Rp. 152,097,000,-

Penelitian tentang kebebasan berkumpul  
*Study on Freedom of Assembly*

LP3ES - Jakarta

Rp. 24,950,000,-

Penerbitan Buku Kebebasan Berkumpul  
*To published a book Freedom of Assembly*

Sekretariat Bina Desa (Sumatera, Jawa, Bali & NTT)  
Rp. 142.010.000,-  
Penelitian tentang gerakan petani dan pembentukan serikat petani di Indonesia  
*Study of Farmer's Movement and Development of Farmer's Organization in Indonesia (Eighties Era Farmer's Movement Case Study)*

INFID - Jakarta  
Rp. 85.629.400,-  
Lokakarya Nasional Reposisi Orhanisasi Non Pemerintah  
*National Workshop NGO Reposition*

BK3I (Jakarta, Sulawesi Utara, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat)  
Rp. 167.674.200,-  
Seminar dan Penerbitan Buku dalam Rangka Pengembangan Kelembagaan Ekonomi yang Berbasis Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan  
*Fact Finding, seminar & published a book for community based economic development*

PAN Indonesia Jakarta  
Rp. 20.050.000,-  
Membangun Gerakan Anti-Pembajakan pada Masyarakat Madani Indonesia  
*Development anti hijacking movement for civil society in Indonesia*

Koalisi Anti Utang Jakarta  
Rp. 11.000.000,-  
Kampanye Anti Utang  
*Campaign for anti Debt*

BK3I - Jakarta  
Rp. 13.300.000,-  
Dialog dengan Parpol-parpol tentang Reposisi Peranan Koperasi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional

*Dialogue with Political Party about reposition cooperative in national economic development*

Koalisi NGO HAM Aceh (Banda Aceh)  
Rp. 31.300.000,-  
Kongres Korban Pelanggaran HAM Aceh  
*Congress for Victim of Human Right Violation in Aceh*

Evergreen Indonesia Sulawesi Tengah (Palu)  
Rp. 30.000.000,-  
Resolusi Konflik dan Wacana Multikultur Menuju Keberdayaan Masyarakat Sipil di Sulawesi Tengah  
*Conflict Resolution & Multicultural for Civil Society Empowerment in Central of Sulawesi*

SULUH Indonesia Sulawesi Tenggara (Kendari)  
Rp. 23.893.00,-  
Tinjauan Kritis dan Menjaring Pendapat para Pihak terhadap Kesiapan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sulawesi Tenggara  
*Critical consideration & pooling for implementing autonomic local at Central Sulawesi*

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Jakarta  
Rp. 44.525.000,-  
Meningkatkan Intervensi Publik pada Proses Pembuatan Kebijakan Pertambangan  
*To Increase the Public Intervention for Mine Law Making Process*

PSHK Jakarta  
Rp. 10.999.700,-  
Mencermati Proses Revisi UU No. 22 Tahun 1999  
*Meticulous Revision Process of Law No. 22 /1999*

Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso (Pokja - RKP)  
Rp. 15.217.325,-  
Penelitian Resolusi Konflik Poso  
*Research of Conflict Resolution in Poso*